

Analisis Pemahaman Mahasiswa Calon Guru Sekolah Dasar tentang Sejarah Lahirnya Pancasila

Serlina Boru Sinaga¹, Roberto W. Marpaung²

^{1,2}Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Musamus

Email : ¹serlinaborsin@unmus.ac.id, ²roberto_fkip@unmus.ac.id

Diterima	30	Mei	2026
Disetujui	30	Juni	2026
Dipublish	30	Juni	2026

Abstract

Pancasila (five moral principles) has become the foundation (*filosofische grondslag*), way of life (*Weltanschauung*), and ideology of Indonesia. It has become a set of principles, perspectives and beliefs to maintain the unity, guidance, and sources of all law. Pancasila, as the national ideology, has been the foundation of philosophy. Students who study teacher training and education must have strong and mature understanding and comprehension to the history of Pancasila. A quantitative descriptive research design was applied to describe the students' knowledge about the history of how Pancasila became the foundation of the nation. Platform of Google Form was used the main instrument of the research. The population consisted of 54 students from 4 classroom of academic year 2025. Incidental technique, students are not obliged to fill the questionnaire. The result of the research showed that 42.6 % respondents knew and were able to explain completely the process of BPUPK formation, other 42.6 % respondents knew and were able to explain uncomplete BPUPKI formation, 14.8% only knew the process of BPUPK formation. Knowledge of students on the first meeting of BPUPK showed that 48.1 % understood and were able to explain specifically the discussion in BPUPK meeting, 29.6 % respondents knew the ratification process of Pancasila as the national foundation, 51.9 % respondents understood the ratification process of Pancasila as the nation foundation and 18.5 % respondents had incomplete understanding on the ratification process of Pancasila. After obtaining data on students' knowledge and understanding of Pancasila and BPUPK ratification, the researcher collect data on the students understanding and benefit of Pancasila as a Subject. The result showed that 59.3 % respondents understood and received benefit of learning Pancasila Subject, 33.3 respondents understood however were unable to explain about Pancasila Subject, and the rest 7.45 % respondents did not understand and viewed Pancasila Subject unessential.

Key Words: *Pancasila Subject, BPUPK, History*

Abstrak

Pancasila telah disepakati para pendiri bangsa menjadi dasar negara (*filosofische grondslag*), pandangan hidup (*Weltanschauung*), dan ideologi negara yang berfungsi menjadi seperangkat prinsip, pandangan, dan keyakinan (*a set of beliefs*) untuk menjaga keutuhan (meja statis) dan menuntun (*leitstar dinamis*), sumber dari segala sumber hukum, kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia merupakan dasar falsafah didalam negara Indonesia. Pengetahuan mahasiswa calon guru terhadap sejarah lahirnya Pancasila harus dimiliki secara matang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang menggambarkan pemahaman mahasiswa tentang sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara melalui google form. Populasi yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari 54 mahasiswa dari 4 kelas angkatan 2025. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil dengan metode sampling insidental, dimana



responden tidak mendapat paksaan untuk mengisi kuesioner. Proses pembentukan BPUPK: Mengetahui dan mampu menjelaskan dengan lengkap proses pembentukan BPUPK 42,6%, mengetahui dan cukup menjelaskan proses pembentukan BPUPK 42,6% mengetahui dan cukup menjelaskan proses pembentukan BPUPK 42,6%, cukup mengetahui proses pembentukan BPUPK 14,8%. Pengetahuan mahasiswa tentang Sidang Pertama BPUPK: memahami dan mampu menjelaskan secara rinci yang dibahas dalam sidang pertama BPUPK 48,1%. Pengetahuan mahasiswa terhadap proses pengesahan Pancasila sebagai dasar negara: memahami dan mampu menjelaskan secara rinci proses pengesahan Pancasila sebagai dasar negara 29,6%, memahami proses pengesahan Pancasila sebagai dasar negara 51,9% dan cukup memahami proses pengesahan Pancasila sebagai dasar negara 18,5%. Pemahaman dan manfaat dari mata kuliah Pancasila: Memahami dan memperoleh esensi dari mata kuliah Pancasila 59,3%, Memahami namun tidak dapat menjelaskan mata kuliah Pancasila secara utuh 33,3%, Tidak dapat memahami tidak memperoleh esensi dari mata kuliah Pancasila 7,45%.

Kata Kunci: Mata Kuliah Pancasila, BPUPK, Sejarah

Pendahuluan

Perjalanan panjang perjuangan bangsa Indonesia untuk lepas dari penjajahan Belanda diawali oleh Perang Dunia II (1 September 1939 sampai 2 September 1945). Jepang yang pada saat itu bergabung dalam Blok Poros bersama Jerman dan Italia memanfaatkan peristiwa perang untuk memperluas daerah jajahannya ke Asia. Jepang melakukan penyerangan ke Pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor pada 7 Desember 1941. Perang yang dimenangkan oleh Jepang menjadi Perang Pasifik dimulai untuk menguasai wilayah Asia Tenggara.

Jepang melakukan serangan secara agresif dengan menggunakan peralatan militer yang lebih canggih dan modern membawa Jepang berhasil merebut satu persatu daerah di Asia Tenggara seperti Filipina, Malaya, Singapura dan Hongkong. Setelah berhasil, Jepang kembali melakukan perebutan kekuasaan dari Hindia Belanda. Indonesia yang menjadi daerah jajahan Hindia Belanda menjadi target Jepang. Tidak butuh waktu lama, Indonesia diserahkan oleh Belanda kepada Jepang tanpa perlawanan yang panjang. Pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang dalam perjanjian Kalijati di Subang, Jawa Barat. Dengan perjanjian ini, Indonesia secara de facto menjadi daerah jajahan Jepang.

Wilayah Indonesia yang cukup luas dan beragam membuat Jepang mengalami kesulitan dalam melakukan penjajahan, sehingga Jepang membuat strategi dengan membagi wilayah Indonesia menjadi 3 Bagian besar yaitu: wilayah I terdiri Jawa dan Madura, yang berada di bawah kendali Tomi Shudan - Tentara Ke-16 Angkatan Darat (Rikugun) Jepang. Wilayah ini menjadi pusat administrasi karena dianggap sebagai pusat politik dan pemerintahan bermarkas di Jakarta, wilayah II terdiri dari Sumatera, yang diperintah oleh Osamu Shudan - Tentara Ke-25 Angkatan Darat (Rikugun) Jepang, bermarkas di Bukit Tinggi wilayah III terdiri dari Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, yang dikuasai oleh Dai Ni Nankenkantai - Angkatan Laut (Kaigun) Armada Selatan Ke-2 Jepang berpusat di Makassar.

Jepang berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan propaganda yang mengusung Semboyan Gerakan 3A, Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia dan Jepang Pemimpin Asia. Gerakan 3A yang awalnya untuk menarik simpati bangsa Indonesia tidak sejalan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Jepang. Kebijakan yang keras dan menindas justru mendapatkan perlawanan dari rakyat Indonesia.

Rakyat dipaksa bekerja secara paksa melalui



sistem romusha yang menyebutkan bahwa terdapat 300.000 romusha yang terlibat dan dikirimkan ke luar Jawa hanya 70.000 yang kembali dalam keadaan hidup) sumber daya alam dieksploitasi secara berlebihan dengan peralatan seadanya, dan kehidupan sehari-hari semakin sulit akibat kebijakan ekonomi perang yang diterapkan Jepang. (Peter Kasenda, 2015: 121)

Kebijakan Jepang yang tidak manusiawi terhadap rakyat Indonesia semakin membawa kekalahan bagi Jepang. Jepang berhasil di hentikan oleh Amerika Serikat ketika melakukan pendaratan di Port Moresby pada Mei 1942. Kemenangan Jepang dalam perang Pasifik mengalami kemunduran di tandai dengan jatuhnya daerah jajahannya ke tangan sekutu, kondisi ini semakin memperlemah Jepang dan memperkuat Amerika Serikat.

Pertempuran Solomon Timur menambah rangkaian kekalahan Jepang terhadap Amerika Serikat. Dukungan yang kurang dari Rakyat Indonesia membuat Jenderal Koiso Kuniaki berjanji memberikan kemerdekaan kepada Indonesia seperti yang dijanjikan di awal Jepang masuk ke Indonesia.

Kekalahan demi kekalahan yang dialami Jepang menyebabkan mereka menempuh berbagai upaya demi mendapatkan dukungan. Dalam situasi yang terdesak pada tanggal 7 September 1944 di dalam sidang istimewa ke – 85 Teikoku Ginkai (Parlemen Jepang) di Tokyo, Jenderal Kuniaki Koiso

mengumumkan mengenai pendirian pemerintahan Kekaisaran Jepang di wilayah Asia Timur Raya, dimana Indonesia juga tercakup pula didalamnya.

Dalam pengumuman tersebut, Koiso memberikan janji bahwa To-Indo (sebutan Indonesia dari Pemerintah Jepang) bagi Indonesia dari mereka, akan dapat memperoleh kemerdekaannya “di kemudian hari” tanpa menentukan tepatnya kapan tanggal kemerdekaan tersebut. Hal ini lebih merupakan dalih dari Jepang agar rakyat Indonesia dapat bersimpati dan mendukung Jepang serta balatenteranya yang kala itu sudah terdesak oleh Sekutu. Sehingga pada tanggal 1 Maret 1945, Kumakichi Harada sebagai Saikoo Sikikan mengumumkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan guna merespon pernyataan dari Perdana Menteri Koiso. Tindakan tersebut dilakukan melalui Gunseikan (Kepala Pemerintahan Militer Angkatan Darat ke 16 di Jawa dan Madura) antara lain ialah:

1. Mendirikan Badan untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan yang selanjutnya disebut Badan Penyelidik.
2. Mendirikan Kenkoku Gakuin (Perguruan Tinggi Pamong Praja) yang melatih dan mendidik calon pemimpin negara yang baru.
3. Memperluas pembicaraan mengenai kemerdekaan. Taufik Abdullah(2013:140)



(BPUP:2025)

Pembentukan Dokuritu Zyunbi Tyoosa-kai



dalam bahasa Indonesia adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Tujuan pembentukan BPUPK adalah menyelidiki hal-hal yang penting mengenai kemerdekaan Indonesia. Selain itu, Badan Penyelidik ini juga akan menyediakan serta memberikan segala sesuatu sebagai bahan untuk diperbincangkan kepada panitia persiapan kemerdekaan yang akan dibentuk. Dalam hal ini, Badan Penyelidik berkewajiban untuk mempelajari dan menyelidiki segala sesuatu urusan penting mengenai hal-hal politik, ekonomi, tata-usaha pemerintahan, kehakiman, pembelaan negeri, lalu-lintas dan sebagainya, yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan Negara Indonesia.

Tanggal 29 Mei 1945, ketua sidang Badan Penyelidik Upaya Kemerdekaan (BPUPK) dr. KRT Radjiman Widyodiningrat membuka sidang dengan melontarkan pertanyaan yang tidak terpikirkan oleh anggota sidang. Apa Dasar Negara kita jika merdeka nanti?

Bermula dari pertanyaan dan tantangan dr KRT Radjiman Widyodiningrat. "Apa dasar negara" jika Indonesia Merdeka dalam sidang BPUPK tanggal 29 Mei sd 1 Juni 1945. ▪ Dari 63 dan menjadi 69 anggota BPUPK, tidak satupun yang dapat menjawab secara utuh dan lengkap pertanyaan itu. Berbagai pemikiran dan usulan muncul, tapi mempunyai penekanan yang berbeda-beda. Ada yang menekankan aspek ketuhanan, ada yang menekankan aspek kemanusiaan, demokrasi, musyawarah dan keadilan dan kesejahteraan sosial. Akibatnya, tak satu pun pendapat yang diterima secara bulat oleh anggota sidang. Menurut bung Hatta, anggota BPUPK menghindari perbincangan tentang dasar negara karena khawatir akan menimbulkan perdebatan panjang, sementara kita (bangsa Indonesia) sudah terdesak oleh waktu untuk segera Merdeka. Ir. Sukarno tampil dengan pidato 1 jam, pada 1 Juni 1945, menjawab

pertanyaan dr. KRT Radjiman Widyodiningrat secara utuh. Diiringi 14 kali tepuk tangan riuh rendah.

Pancasila telah disepakati para pendiri bangsa menjadi dasar negara (*filosofische grondslag*), pandangan hidup (*Weltanschauung*), dan ideologi negara yang berfungsi menjadi seperangkat prinsip, pandangan, dan keyakinan (*a set of beliefs*) untuk menjaga keutuhan (meja statis) dan menuntun (*leitstar dinamis*), sumber dari segala sumber hukum, kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia merupakan dasar falsafah didalam negara Indonesia. Menurut Yudi Latif, Pancasila adalah warisan jenius Nusantara sesuai dengan karakteristik lingkungan alamnya (Latif, 2011). Dengan ini, eksistensi Pancasila sesungguhnya tidak hanya disepakati sejak awal sebagai normative ideology yang menaungi tata peraturan perundangundangan maupun kebijakan pembangunan negara dengan kedudukannya sebagai sumber dari segala sumber hukum, melainkan juga sebagai sebuah *living ideology* yang terkonstruksi secara menyejarah ke dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Namun sayangnya pada era kekinian, keberadaan Pancasila sebagai ideologi tampak semakin terpinggirkan. Masyarakat seperti tidak memiliki lagi ikatan memori kolektif terhadap hal-hal mendasar. Pancasila seakan tenggelam pada pusaran sejarah masa lalu karena dianggap tidak lagi relevan untuk diaktualkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal ini, Pancasila tidak hanya sekadar bergeser menjadi slogan, hafalan, atau teori dalam kehidupan akademik berbagai sekolah atau perguruan tinggi, namun semakin menghilang dalam keseharian kebijakan publik maupun perilaku masyarakat. Jika dicermati, kondisi



yang memprihatinkan ini jelas berkait erat dengan perubahan lanskap kehidupan masyarakat yang makin mengarah pada peningkatan kebebasan yang diiringi oleh arus globalisasi yang membawa masuk paham transnasionalisme yang bertentangan dengan Pancasila selama 20 (dua puluh) tahun ke belakang.

Pendidikan Pancasila kembali menjadi muatan dan pembelajaran wajib sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pendidikan Pancasila menjadi bagian penting dalam membentuk karakter kebangsaan dan ketahanan ideologis warga negara Indonesia di tengah perubahan zaman yang cepat dan kompleks. Pancasila tidak sekadar dasar negara atau landasan normatif, melainkan menjadi fondasi filosofis, moral, dan ideologis dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberadaannya yang konstitusional, sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan, menjadikan Pancasila sebagai sumber nilai utama dalam pembangunan nasional dan dalam pendidikan karakter generasi muda, secara khusus dalam jenjang pendidikan tinggi.

Kesadaran akan pentingnya penguatan nilai-nilai Pancasila pada jenjang pendidikan tinggi makin menguat dalam konteks globalisasi, disrupsi teknologi, degradasi nilai kemanusiaan, intoleransi, hingga tantangan kohesi sosial. Oleh karena itu, pendidikan tinggi tidak cukup hanya membekali mahasiswa dengan keterampilan teknis dan pengetahuan akademik, tetapi juga dengan daya tahan etis dan jati diri kebangsaan yang berakar pada nilai-nilai Pancasila.

Dalam kerangka regulasi nasional, penguatan

Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi memiliki landasan kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menegaskan posisi Pendidikan Pancasila sebagai Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK). Hal ini sejalan dengan mandat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional yakni Pancasila tidak hanya menjadi salah satu landasan dalam penyelenggaraan pendidikan, tetapi secara konkrit perlu terintegrasi dalam komponen penyelenggaraan pendidikan yaitu kurikulum.

Untuk itu visi pendidikan Pancasila di Pendidikan Tinggi adalah terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila dengan misi 1) mengembangkan potensi akademik peserta didik (misi psikopedagogis); 2) menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa dan negara (misi psikososial); 3) membangun budaya berPancasila sebagai salah satu determinan kehidupan sosial (misi sosiokultural); 4) mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik (*syntethic discipline*) sebagai misi akademik (Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2016)

Makna ini tercantum dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah dimaksud secara eksplisit mengamanatkan agar kurikulum Pendidikan Pancasila jenjang Pendidikan Tinggi disusun tidak hanya berdasarkan Standar Nasional Pendidikan, tetapi juga berdasarkan Pedoman Materi Pembelajaran Pancasila.

Metode Penelitian

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan



deskriptif kuantitatif yang menggambarkan pemahaman mahasiswa tentang sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara melalui google form. Metode kuantitatif dipilih karena data yang dikumpulkan berbentuk angka yang kemudian dianalisis dengan cara statistik untuk memperoleh gambaran objektif mengenai fenomena yang sedang diteliti. Penelitian deskriptif memberikan penjelasan yang jelas mengenai kondisi nyata yang dialami oleh responden dalam hal pemahaman nilai-nilai Pancasila (Ali, 2022).

- b. Populasi yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari 54 mahasiswa dari 4 kelas angkatan 2025. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil dengan metode sampling insidental, dimana responden tidak mendapat paksaan untuk mengisi kuesioner.

c. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertanyaan yang diberikan dalam google form. Ada 4 pertanyaan yang diberikan yaitu (1) Apa yang kamu ketahui mengenai proses pembentukan BPUPK? (2) Apa yang kamu ketahui dalam sidang Pertama BPUPK?, (3) Apa yang kamu ketahui dalam proses pengesahan Pancasila sebagai dasar negara, (4) Apa yang kamu pahami dan dapat dari mata kuliah Pancasila.

d. Teknik Pengumpulan Data

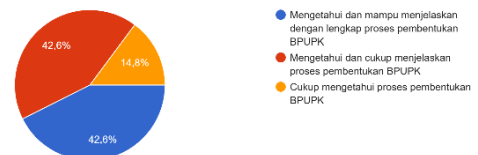
Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden. Sebelum disebarkan lebih luas, kuesioner diujicobakan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa setiap butir pernyataan mudah dipahami oleh responden. Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk memperoleh data yang objektif, cepat, dan mencakup responden

dalam jumlah lebih besar

- e. Analisis terhadap data dilakukan menggunakan metode statistik deskriptif dengan menghitung persentase jawaban dari para responden untuk setiap item dalam kuesioner. Persentase yang diperoleh kemudian dianalisis dan ditafsirkan untuk menunjukkan seberapa baik pemahaman siswa mengenai fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Metode ini diterapkan untuk memberikan interpretasi terhadap data kuantitatif agar menjadi gambaran yang lebih jelas mengenai keadaan responden (Ardiawan, 2022).

Hasil dan Pembahasan

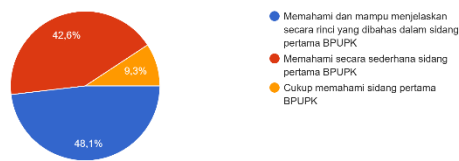
1. Apa yang kamu ketahui mengenai proses pembentukan BPUPK
54 jawaban



Data menunjukkan bahwa kurang dari 50% yakni 42,6% mahasiswa calon guru mengetahui dan mampu menjelaskan dengan lengkap proses pembentukan BPUPK. Persentase yang sama juga sebanyak 42,6% mahasiswa calon guru mengetahui dan cukup menjelaskan proses pembentukan BPUPK. Persentasi ini mencerminkan pemahaman mahasiswa sudah baik mengenai proses pembentukan BPUPK. Hanya 14,8% mahasiswa cukup mengetahui dan tidak mampu menjelaskan proses pembentukan BPUPK. Dari hasil penelitian ini, perlu evaluasi terhadap mahasiswa yang cukup mengetahui supaya memiliki kemampuan yang baik dalam menjelaskan proses pembentukan BPUPK.

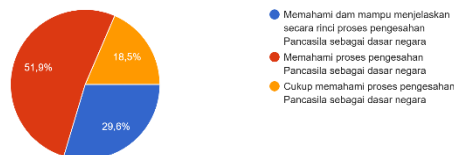


2. Apa yang kamu ketahui dalam Sidang Pertama BPUPK
54 jawaban



Tingkat pengetahuan mahasiswa calon guru tentang sidang Pertama BPUPK menunjukkan hasil yang cukup jauh persentasenya. Responden dengan memahami dan mampu menjelaskan secara rinci yang dibahas dalam sidang pertama BPUPK mencapai 48,1%, diikuti oleh memahami secara sederhana sidang pertama BPUPK 42,6% dan cukup memahami sidang pertama BPUPK sebesar 9,3%. Poin ini menunjukkan keberhasilan mahasiswa dalam mengetahui rangkaian sidang pertama BPUPK.

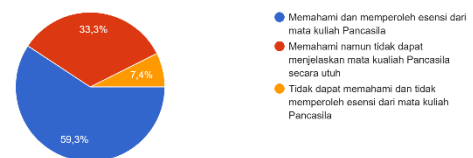
3. Apa yang kamu ketahui dalam proses Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara
54 jawaban



Perjalanan perjuangan pendiri bangsa dalam menetapkan Pancasila menjadi dasar negara dilaksanakan sehari setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya yaitu tepatnya 18 Agustus 1945 pada sidang PPKI. Pancasila sebagai dasar negara dan Pembukaan UUD 1945 diresmikan secara bersamaan. Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 29,6%

mahasiswa calon guru memahami dan mampu menjelaskan secara rinci proses pengesahan Pancasila sebagai dasar negara negara, sebanyak 51,9% mahasiswa calon guru hanya memahami proses pengesahan Pancasila sebagai dasar dan sebanyak 18,5% mahasiswa cukup memahami proses pengesahan Pancasila sebagai dasar negara.

4. Apa yang kamu pahami dan dapat dari mata kuliah Pancasila?
54 jawaban



Salah satu mata kuliah wajib yang harus diterima mahasiswa adalah Pancasila. Mata Kuliah Pancasila di jenjang Pendidikan Tinggi memiliki *learning outcome* terhadap praksis nilai-nilai Pancasila pada diri mahasiswa secara afektif, didalamnya memuat tujuan pemahaman mendasar mengenai perumusan dasar negara dan ideologi negara yang harus tertanam pada diri mahasiswa. Selain daripada pemahaman ideologis yang dituntut didalam mata kuliah Pancasila, permasalahan yang terjadi di Indonesia seperti halnya ekstremisme, masalah korupsi dan penegakkan hukum, masalah kesadaran membayar pajak, disintegrasi bangsa, hingga masalah lingkungan menjadi urgensi mata kuliah Pancasila di Pendidikan Tinggi (Silvia 2023:34). Dalam hasil pengumpulan data menunjukkan sebesar 59,3% mahasiswa calon guru memahami



dan memperoleh esensi dari mata kuliah Pancasila, 33,3% memahami namun tidak dapat menjelaskan mata kuliah Pancasila secara utuh, sebesar 7,4 tidak dapat memahami dan tidak memperoleh esensi dari mata kuliah Pancasila.

Kesimpulan

Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan mahasiswa mengenai proses pembentukan BPUPK yang mengetahui dan mampu menjelaskan dengan lengkap proses pembentukan BPUPK masih dibawah 50% ini menunjukkan diperlukannya evaluasi dan langkah konkret untuk mempersiapkan mahasiswa calon guru memiliki pengetahuan yang lengkap mengenai sejarah proses pembentukan BPUPK. Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan mahasiswa tentang sidang pertama BPUPK, mahasiswa yang memahami dan mampu menjelaskan secara rinci yang dibahas dalam sidang BPUPK memiliki persentase 48,1% masih di bawah 50%. Pemahaman mahasiswa dalam proses pengesahan Pancasila sebagai dasar negara, memahami dan mampu menjelaskan secara rinci proses pengesahan Pancasila sebagai dasar negara hanya 29,6%, persentase yang sangat kecil. Namun pada pertanyaan yang terakhir yakni pemahaman mahasiswa dari mata kuliah Pancasila memiliki hasil yang baik yaitu sebanyak 59,3 % mahasiswa memahasi dan memperoleh esensi dari matakuliah Pancasila. Dari hasil penelitian menunjukkan perlunya evaluasi secara mendalam terhadap ketercapaian tujuan perkuliahan disetiap penilaian yang diambil oleh dosen.

Daftar Pustaka

- Rahmelia.2023. Pemahaman Peserta Mata Kuliah Pancasila terhadap Nilai-Nilai Pancasila Selama Pembelajaran Daring di IAKN Palangka Raya. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, Vol 08, No 01, halaman 33-46
- Kasenda, P. (2015). *Soekarno di Bawah Bendera Jepang: 1942-1945*. Penerbit Buku Kompas.
- Sumber: Taufik Abdullah (Ed.), *Sejarah Pemikiran Indonesia Modern*, Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, 2013, hal. 140.
- Ali, M. M. (2022). Metodologi penelitian kuantitatif dan penerapannya. *Education Journal: Penelitian Ibnu Rusyd*, 2(2).
- Ardiawan, K. N. (2022). Metode penelitian kuantitatif: Konsep, jenis, tahapan dan kelebihan. *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(7)
- Latif, Y. (2011). *Negara Paripurna : Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, D. J. P. dan K. (2016). *Pendidikan Pancasila*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti
- Abdullah, Taufik (Ed.). 2013. *Sejarah Pemikiran Indonesia Modern*. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

